

BAB V
PERAN GREENPEACE MENANGANI PENCEMARAN UDARA DI KOTA
JAKARTA

Untuk mengalisa peran Greenpeace dalam menangani pencemaran udara di Jakarta pada tahun 2017-2021, pada BAB V pembahasan akan ditujukan untuk menjelaskan apa peran yang dilakukan Greenpeace sebagai INGO dalam upaya penanganan pencemaran udara di Jakarta. Penjelasan akan dijabarkan guna menguatkan asumsi David Lewis dan Nazneen Kanji mengenai tiga peran utama dari sebuah INGO. Dalam penelitian ini, penulis menemukan beberapa metode yang diambil oleh Greenpeace berkenaan dengan penanganan pencemaran udara di Jakarta, diantaranya:

5.1 Penelitian Ilmiah dan Analisa terkait Pencemaran Udara di Jakarta

Dalam berbagai permasalahan lingkungan global, *International Non-Governmental Organization* (INGO) telah turut berkontribusi secara substantif melalui dukungan penelitian yang relevan dan efektif. INGO memiliki kemampuan dan kontribusi pada semua tahap yang berbeda dalam tahap penelitian seperti advokasi, pengembangan kapasitas, diseminasi, mobilisasi sumberdaya, dan analisis hasil penelitian untuk dibagikan dan dimanfaatkan.⁸⁷ Dalam hal ini, meskipun INGO tidak selalu terlibat dalam kegiatan ilmiah, tetapi secara intrinsik semua aktivitasnya berbasis ilmiah, baik tinjauan ilmiah dan asumsi yang muncul dari kesenjangan pengetahuan, maupun penelitian ilmiah di lapangan dan di laboratorium.⁸⁸

Secara global, Greenpeace memiliki laboratorium dengan *Science Unit* yang berbasis di University of Exeter, Inggris. Para peneliti di dalam *Science Unit Greenpeace* memiliki peran utama dalam membantu kampanye Greenpeace dengan

⁸⁷ Delisle, H., Roberts, J. H., Munro, M., Jones, L., & Gyorkos, T. W. (2005). The role of NGOs in global health research for development. *Health Research Policy and Systems*, 3(1).

⁸⁸ Parmentier, Remi. (2012). *Role and Impact of International NGOs in Global Ocean Governance*. Leiden & Boston: Martinus Nijhoff Publisher. (hlm 223–224).

melakukan kajian sekaligus memberikan database literatur ilmiah sebagai sumber informasi lengkap sehingga dapat memberikan masukan kepada para juru kampanye Greenpeace di seluruh dunia.⁸⁹ *Science Unit Greenpeace* memiliki kemampuan dalam memberikan sumber informasi mencakup berbagai disiplin keilmuan yang relevan dengan isu-isu lingkungan, mulai dari analisis kimia/biokimia, ekologi terestrial kelautan, dan toksikologi.⁹⁰ Publikasi pertama dari Laboratorium penelitian Greenpeace, tercatat terjadi pada tahun 1988 dengan judul “*The Fawley B Project: Consideration of the Atmospheric Effects and Methods of Pollution Control*,” yang memuat hasil penelitian Greenpeace dan tindakan pengendalian pencemaran udara yang terjadi di Jepang dan beberapa negara dunia ketiga selama periode pertumbuhan ekonomi pasca Perang Dunia Kedua.⁹¹

Terkait pencemaran udara, Greenpeace memulai riset bersama *Atmospheric Chemistry Modeling Group* (ACMG) dari Universitas Harvard tentang dampak PLTU Batubara di Indonesia pada tahun 2015.⁹² Dari hasil penelitian tersebut, ditemukan data bahwa sekitar 6.500 jiwa/tahun menjadi korban kematian dini akibat peningkatan resiko penyakit dari hasil pembakaran batu bara di Indonesia. Tidak hanya itu, secara rinci Greenpeace juga melakukan studi kasus ke beberapa PLTU di Indonesia dan menunjukan peningkatan penyakit-penyakit yang berhubungan dengan tingkat polusi udara yang terjadi.

Diakhir laporan, Greenpeace memberikan beberapa rekomendasi kepada pemerintah Indonesia agar dampak PLTU Batubara dapat segera ditangani. Adapun rekomendasi tersebut, diantaranya: (1) Berkomitmen untuk tidak membangun PLTU Batubara baru, (2) Menutup PLTU Batubara tertua dan terkotor, (3) Memperkuat aturan hukum dan penegakannya, (4) Mengembangkan dan meningkatkan penggunaan

⁸⁹ Greenpeace. (2022). Greenpeace Science Unit. – *Greenpeace International*. <https://www.greenpeace.to/greenpeace/>. Diakses 12 Juli 2022.

⁹⁰ Greenpeace. (2022). Greenpeace Science Unit. Diakses 12 Juli 2022.

⁹¹ Johnston, P.A. (1988). The Fawley Project: Consideration of the Atmospheric Effects and Methods of Pollution Control. *Greenpeace Research Laboratories*. (pp. 1–16).

⁹² Greenpeace Indonesia. (2016). *Aku, Batubara & Polusi Udara*. – *Greenpeace Indonesia*. <https://greenpeace.org/>. Diakses 17 Juli 2022.

energi terbarukan, dan (5) Pemerintah harus berbuat lebih baik untuk mengatasi perubahan iklim.⁹³

Khusus dalam kasus pencemaran udara yang terjadi di Jakarta, di tahun 2017 Greenpeace merilis laporan dengan judul, “*Assessing the air quality, toxic and health impacts of coal-fired power plants surrounding the Jakarta megacity*”, yang berisikan analisis terperinci tentang kualitas udara dan dampak kesehatan yang timbul akibat pembangkit listrik tenaga batu bara yang sedang beroperasi maupun yang sedang dibangun di sekitar Jakarta.⁹⁴ Kajian ini dilakukan untuk dapat menunjukkan bahwa ambisi pemerintah Indonesia dalam pembangunan pembangkit listrik batu bara di wilayah Jawa Barat yang merupakan salah satu daerah terpadat di seluruh dunia, akan memiliki dampak lingkungan dan ancaman keamanan manusia yang sangat serius.

Dalam laporan tersebut, melalui permodelan dispersi atmosfer Greenpeace menyimpulkan bahwa emisi dari aktivitas batubara di wilayah Jabodetabek yang sedang beroperasi maupun yang akan dioperasikan akan memberikan tiga dampak yang secara langsung sangat dirasakan oleh masyarakat di kota-kota sekitarnya, termasuk di wilayah Jakarta. Diantaranya: (1) Meningkatnya partikel-partikel beracun seperti NO₂ di udara yang beresiko menyebabkan berbagai penyakit, seperti kanker paru-paru, penyakit pernafasan akut, stroke, dan infeksi saluran pernafasan pada anak hingga menyebabkan peningkatan angka kematian dini. (2) Kondisi partikel-partikel berbahaya dapat menyebabkan hujan asam yang dapat mempengaruhi tanaman dan tanah sehingga mengakibatkan buruknya kualitas air. (3) Emisi dari PLTU berpotensi menyebabkan hujan dengan kontaminasi logam berat beracun seperti zat arsenik, nikel, timbal, dan merkuri.⁹⁵

⁹³ Greenpeace Indonesia. (2016). *Aku, Batubara & Polusi Udara*. Diakses 17 Juli 2022.

⁹⁴ Myllyvirta, L., & Chuwah, C. (2017). *Assessing the air quality, toxic and health impacts of coal-fired power plants surrounding the Jakarta megacity*. *Greenpeace Research Laboratories*. (pp. 1–21).

⁹⁵ Myllyvirta, L., & Chuwah, C. (pp. 1–21).

Tabel 5.1 Proyeksi kematian dini dan dampak kesehatan lainnya akibat emisi dari pembangkit listrik yang diteliti Greenpeace (2017), dalam kasus per tahun.

	Efek Kesehatan	PLTU yang beroperasi	95% CI	PLTU baru	95% CI
Angka kematian dini karena PM 2.5	Infeksi saluran pernafasan bawah (bayi)	90	(20-220)	50	(10-110)
	Kanker paru-paru	130	(60-210)	210	(90-340)
	Penyakit Kardiovaskular lainnya	390	(240-540)	400	(250-560)
	Penyakit jantung iskemik	1,110	(720-1510)	1,110	(710-1500)
	Penyakit stroke	1,270	(780-1760)	1,350	(830-1870)
	Penyakit pernafasan lainnya	140	(90-200)	160	(100-230)
	Penyakit paru paru obstruktif kronis	190	(110-260)	210	(130-290)
	PM 2.5 Total	3,330	(2020-4690)	3,490	(2120-4890)
Angka kematian dini karena NO2	Semua kasus	1,940	(1120-4140)	1,930	(1110-4130)
Kematian dini	Total	5,260	(2770-7450)	5,420	(2870-7640)

Sumber: Greenpeace Internasional

Pada tahun 2019, Greenpeace kembali merilis hasil penelitiannya di Indonesia dengan judul “*Health impacts of units 9&10 of the Java coal-fired power plant in Banten, Indonesia*”⁹⁶. Berdasarkan temuan di lapangan, laporan ini memuat beberapa hal terkait aktivitas pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Suralaya. Pertama, laporan ini menjelaskan bahwa dampak kesehatan akibat aktivitas PLTU akan semakin berbahaya seiring dengan meningkatnya jumlah polutan yang bertebaran

⁹⁶ Anhäuser, A., Son, M., Farrow, A., & Myllyvirta, L. (2019) Health impacts of units 9&10 of the Jawa coal-fired power plant in Banten, Indonesia. *Greenpeace Southeast Asia*. (pp. 1–22).

setiap harinya. Kedua, laporan ini berusaha memberikan gambaran standar ganda yang diterapkan oleh Korea Selatan sebagai sponsor PLTU, yang secara resmi telah berkomitmen penuh terhadap kualitas udara bersih di negaranya. Standar emisi domestik Korea Selatan merupakan salah satu yang paling ketat akibat desakan publik terhadap kualitas udara bersih. Namun disisi lain, proyek PLTU di Indonesia yang didukung oleh lembaga keuangan publik Korea Selatan menerapkan peraturan emisi yang sangat rendah terhadap polusi udara dari pada yang diterapkan di negaranya.

Tabel 5.2 Batas Emisi bagi PLTU di Korea Selatan dan Indonesia

	Batasan Emisi (mg/Nm ³)		
	NO ₂	SO ₂	Dust
Standar emisi PLTU baru sejak Januari 2015 di Korea selatan	28	65	5
Gangneung ECO power (Korea Selatan)	19	39	3
PLTU Suralaya (Indonesia)	251	221	100

Sumber: Greenpeace Asia Timur

Laporan ini tidak hanya menjelaskan standar ganda Korea Selatan terhadap kualitas udara, tetapi juga dampak kesehatan yang diterima oleh penduduk di wilayah sekitar PLTU. Dalam temuannya, Greenpeace mengemukakan bahwa jika standar ganda yang terjadi dalam batas emisi dihilangkan dan PLTU Suralaya dioperasikan pada batas emisi Korea Selatan, akan menghindari angka kematian dini antara 62-199 kematian, dengan total 1.900 hingga 5.800 nyawa yang dapat diselamatkan selama 30 tahun beroperasi.⁹⁷

Pada tahun 2021, Greenpeace Internasional bekerjasama dengan Greenpeace Indonesia kembali merilis sebuah laporan terkait persoalan polusi udara dengan judul, “Pengukuran Satelit Mengungkapkan, Polusi Udara Beracun NO₂ di Sejumlah Kota Besar di Indonesia Meningkat Pada Tahun 2021”.⁹⁸ Laporan ini berisikan ulasan dan

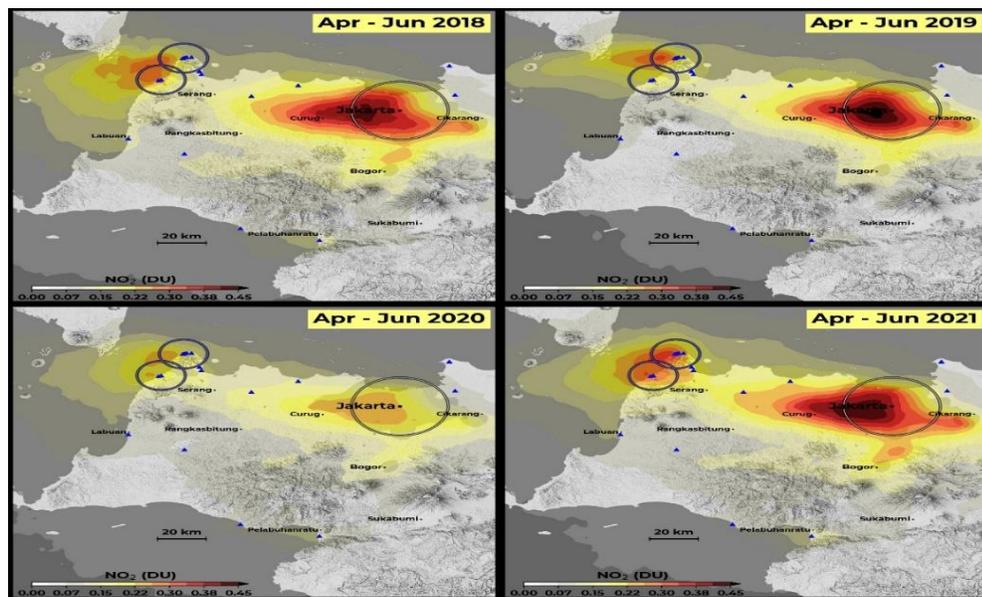
⁹⁷ Anhäuser, A., Son, M., Farrow, A., & Myllyvirta, L. (pp. 1–22).

⁹⁸ Anhäuser, A., Farrow, A. (2021). Pengukuran Satelit Mengungkapkan, Polusi Udara Beracun NO₂ di Sejumlah Kota Besar di Indonesia Meningkat Pada Tahun 2021. *Greenpeace Indonesia*. (pp. 1–21).

analisis Greenpeace terhadap data pencemaran nitrogen dioksida (NO_2) melalui pengamatan satelit di beberapa kota di Indonesia, salah satunya adalah Kota Jakarta.

Khusus untuk wilayah Jakarta, lewat pengamatan satelit ditemukan bahwa sepanjang bulan April-Juni 2020, terjadi penurunan jumlah kolom atmosfer NO_2 di Jakarta dari tahun sebelumnya yakni sebanyak 35%. Namun satu tahun berselang, selama April-Juni 2021, jumlah kolom atmosfer NO_2 kembali meningkat sebesar 54%.

Gambar 5.1 Konsentrasi NO_2 di Jakarta Akibat 2 PLTU di Sekitarnya



Sumber: Greenpeace Indonesia

Selain penelitian-penelitian di atas, Greenpeace Indonesia sebagai perwakilan Greenpeace di tingkat nasional, juga secara rutin melakukan penelitian dan memberikan siaran pers berkaitan dengan pencemaran udara yang terjadi di Jakarta. Selama tahun 2017 sampai 2021, Greenpeace telah merilis 11 artikel berkenaan dengan pencemaran udara di Jakarta. Beberapa studi lapangan yang dilakukan oleh Greenpeace Indonesia diantaranya: Memantau kualitas udara di beberapa titik di Jakarta, bekerja sama dengan Greenpeace Internasional dan Regional dalam melakukan penelitian, hingga membuat laporan terkait pencemaran udara yang terjadi

Tabel 5.3 Siaran Pers Greenpeace Indonesia Terkait Pencemaran Udara di Jakarta 2017-2021.

No	Penerbit	Judul
1	Greenpeace Indonesia (2017)	Memantau Kualitas Udara Melalui Aplikasi UdaraKita
2	Greenpeace Indonesia (2018)	Polusi Jakarta Masih Terus Diabaikan, Ini Saran Greenpeace
3	Greenpeace Indonesia (2019)	Jakarta Peringkat Satu di Asia Tenggara untuk Kualitas Udara Terburuk
4	Greenpeace Indonesia (2019)	Data KLHK Menunjukkan Pencemaran Udara Tahunan Jakarta Dua Kali Lebih Buruk dari Baku Mutu Udara yang Ditetapkan Pemerintah
5	Greenpeace Indonesia (2019)	Kualitas Udara Jakarta Terus Memburuk, Warga Akan Gugat Presiden, Menteri hingga Gubernur
6	Greenpeace Indonesia (2019)	Ulah ke-492 Tahun, Kualitas Udara Jakarta Terus Memburuk!
7	Greenpeace Indonesia (2019)	Catatan Greenpeace Untuk Instruksi Gubernur Nomor 66 Tahun 2019 tentang Pengendalian Kualitas Udara
8	Greenpeace Indonesia (2020)	Selamat Ulang Tahun Jakarta, Selamat Datang New Normal Polusi
9	Greenpeace Indonesia (2020)	Gugatan Pencemaran Udara “Satu Tahun Digantung Negara”
10	Greenpeace Indonesia (2020)	Polusi Udara Memakan Biaya Rp. 21 Triliun di Jakarta pada Tahun 2020
11	Greenpeace Indonesia (2021)	Tanggapan Greenpeace Terhadap Standar Terbaru WHO Soal Kualitas Udara

Sumber: Greenpeace Indonesia

5.2 Meluncurkan Aplikasi Pemantauan Kualitas Udara

Sebagai bentuk upaya memberikan informasi dan pengetahuan kepada masyarakat Jakarta akan kualitas udara, Greenpeace meluncurkan aplikasi bernama “UdaraKita” yang secara garis besar berisikan informasi kondisi kualitas udara di Jakarta secara *realtime* setiap harinya. Data pada aplikasi yang dirilis pada tahun 2017 ini, diambil dari rerata alat pemantau kualitas udara milik Greenpeace Indonesia di 50 titik yang tersebar di Jabodetabek. Dengan adanya aplikasi tersebut, diharapkan masyarakat dapat mengakses data kualitas udara, tingkat partikulat berbahaya yang menyebar, dan menimbulkan kepedulian masyarakat terhadap kondisi udara disekitarnya.⁹⁹

⁹⁹ Greenpeace Indonesia. (2017). Memantau Kualitas Udara Melalui Aplikasi UdaraKita. – *Greenpeace Indonesia*. <https://greenpeace.org/>. Diakses 16 Juli 2022.

5.3 Kampanye Publik dan Propaganda Media

Menurut Lei Xie dan Joshua Garland, pada tingkat lokal INGO telah mendorong tindakan individu maupun kolektif melalui berbagai kegiatan pemberian informasi maupun pengetahuan lingkungan guna meningkatkan kesadaran dan membantu menciptakan perdebatan tentang masalah lingkungan.¹⁰⁰ Dalam sejarahnya, kampanye Greenpeace sangat bertumpu pada kemampuan untuk menarik perhatian media pada ekspedisi yang akan dilakukan. Oleh sebab itu, sejak pelayaran perdana, Greenpeace turut menyertakan media dengan sepertiga dari kru kapal merupakan para jurnalis dari berbagai bidang.¹⁰¹

Dengan mengusung misi kampanye “*Non Violent Direct Action*”, Greenpeace melaksanakan kampanye-kampanye melalui aksi langsung tanpa adanya kekerasan dengan tujuan menyadarkan kepekaan masyarakat terkait sebuah permasalahan lingkungan, sekaligus mengundang perhatian media agar pesan yang disampaikan dapat menjangkit banyak simpati. Berdasarkan pada prinsip independensi yang terlepas dari otoritas negara dalam agendanya, beberapa kegiatan kampanye dan propaganda media yang dilakukan oleh Greenpeace berkaitan dengan pencemaran udara di Jakarta, diantaranya:

Kampanye pertama Greenpeace terkait pencemaran udara di Jakarta, pada bulan Oktober tahun 2017 di depan kantor Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Republik Indonesia. Dalam aksi ini, sejumlah aktivis Greenpeace melakukan aksi teatrikal menggunakan baju berwarna kulit transparan yang memperlihatkan organ-organ tubuh yang menghitam dan rusak akibat polusi udara. Dengan membawa poster protes bertuliskan *#JakartaUnderPollution*, para aktivis mengikat dirinya pada butiran hitam menyerupai partikel PM 2.5 yang merupakan partikel sangat kecil dan berbahaya akibat polusi yang terjadi.¹⁰² Aksi ini merupakan bentuk penyebaran informasi

¹⁰⁰ Davies, Thomas. (2019). *Routledge Handbook of NGOs and International Relations*. London, New York: Taylor & Francis Group. (hlm. 469).

¹⁰¹ Zelko, Frank. (2013). *Make it a Green Peace! The Rise of Countercultural Environmentalism*. New York: Oxford University Press. (hlm. 80).

¹⁰² Mongabay. (2017). Kualitas Udara Jabodetabek Buruk, Riset Greenpeace: Polusi Membahayakan!. – Mongabay. <https://www.mongabay.co.id>. Diakses 19 Juli 2022.

mengenai permasalahan pencemaran udara kepada masyarakat melalui aksi dan media informasi. Selain itu, Greenpeace juga membagikan *briefing paper* yang berisikan beberapa hal, mulai dari hasil temuan di lapangan terkait pencemaran udara selama 5 bulan pada tahun 2017, serta saran dan desakan Greenpeace terhadap penyelesaian kasus pencemaran udara di Jakarta.

Melalui aksi ini, Greenpeace menyampaikan beberapa tuntutan mengenai permasalahan pencemaran udara di Jakarta, diantaranya: Mendesak pemerintah pusat untuk menyusun dan melaksanakan strategi yang tepat, guna memperbaiki udara dan meningkatkan standar kualitas udara. Mendesak pemerintah daerah se-Jabodetabek untuk melakukan pemantauan kualitas udara secara memadai, memberikan pendidikan dan informasi tentang dampak kesehatan akibat pencemaran udara, dan melaksanakan koordinasi lintas lembaga guna mencapai kualitas udara yang layak bagi masyarakat.¹⁰³

Gambar 5.2 Aksi Teatrical Aktivist Greenpeace di Gedung Kemenkes Jakarta



Sumber: Greenpeace Indonesia

Kampanye mengenai pencemaran udara di Jakarta masih berlangsung pada tahun 2018. Bersamaan dengan perhelatan ajang olahraga multievent se-Asia (Asian Games),

¹⁰³ Greenpeace. (2017). Greenpeace Media Briefing: Kualitas Udara yang Buruk di Jabodetabek. – Greenpeace Indonesia. <https://www.greenpeace.org/>. Diakses 19 Juli 2022.

Greenpeace melakukan aksi kampanye dengan menyewa dan menutup salah satu *billboard* iklan di Jakarta dengan tujuan, memberitakan kepada publik dan para atlet bahwa kondisi udara di Jakarta berada pada level yang tidak sehat.¹⁰⁴ Dengan pesan *#WeBreatheTheSameAir*, Greenpeace menampilkan penampakan wajah mozaik manusia bermasker berlatar hitam, dengan tulisan indeks PM 2.5 yang menunjukkan angka indeks kualitas udara pada level yang tidak sehat.

Dalam siaran pers yang dibagikan, aksi tersebut dilatarbelakangi oleh temuan Greenpeace bahwa berdasarkan data dari 2 stasiun pantau PM 2.5 di Jakarta, menunjukkan bahwa selama sebulan sebelum aksi tersebut Jakarta memiliki lebih dari 22 hari dengan kategori tidak sehat. Oleh karena itu, Greenpeace ingin memberikan pesan kepada masyarakat dan terutama kepada pemerintah, untuk mencari solusi nyata mengatasi persoalan tersebut sebab Indonesia sedang menjadi sorotan dunia sehubungan dengan dipilihnya Kota Jakarta sebagai tuan rumah Asian Games 2018.

Dalam tuntutananya, Greenpeace mendesak perlu adanya komando yang jelas tentang tugas dan kewajiban pemangku kebijakan sehingga penyelesaian persoalan bisa lebih mudah ditangani. Kebijakan-kebijakan yang dihasilkan juga harus dilengkapi dengan kajian ilmiah sebagai sandaran yang terukur dan dapat memperhitungkan sumber-sumber polusi yang ada di Jakarta.¹⁰⁵

¹⁰⁴ Antara. (2018). Greenpeace Aksi Pasang Peringatan Kualitas Udara Jakarta. – *Antara News*. <https://www.antaraneews.com/>. Diakses 19 Juli 2022.

¹⁰⁵ Greenpeace Indonesia. (2018). Polusi Jakarta Masih Terus Diabaikan, Ini Saran Greenpeace. – *Greenpeace Indonesia*. <https://www.greenpeace.org/>. Diakses 19 Juli 2022.

Gambar 5.3 Aksi Kampanye Greenpeace Pada Reklame Besar di Jakarta



Sumber: Greenpeace Indonesia

Masih terkait dengan pencemaran udara, Greenpeace kembali melakukan aksi teatrikal di depan kantor Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pada 5 Maret, tahun 2019. Aksi tersebut ditujukan untuk menyanggah klaim pemerintah Indonesia terkait udara di Jakarta yang dianggap masih dalam kategori sehat. Dalam pemaparan yang disampaikan melalui media, Greenpeace menemukan bahwa Jakarta merupakan salah satu kota paling berpolusi di Asia Tenggara. Konsentrasi PM 2.5 di Jakarta berada pada level empat kali lipat batas aman standar tahunan *World Health Organization* (WHO). Bahkan, berada jauh jika dibandingkan dengan ambang batas menurut standar nasional pada PP No. 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara.¹⁰⁶ Aksi ini mengundang reaksi dan antusiasme dari organisasi lingkungan lokal dan masyarakat Jakarta. Hingga pada akhirnya, terbentuk sebuah aliansi dengan nama “Koalisi Inisiatif Bersihkan Udara Koalisi Semesta” (Koalisi IbuKota), yang memiliki *concern* terhadap pencemaran udara di Jakarta. Koalisi ini, mencoba melakukan cara berbeda dalam merespon persoalan. Jika sebelumnya Greenpeace menggunakan metode kampanye, Koalisi IbuKota menempuh

¹⁰⁶ Greenpeace Indonesia. (2019). Jakarta Peringkat Satu di Asia Tenggara untuk Kualitas Udara Terburuk. – *Greenpeace Indonesia*. <https://www.greenpeace.org/>. Diakses 19 Juli 2022.

jalur hukum dengan menggugat para pejabat yang bertanggungjawab mengatasi masalah tersebut.

Berbagai upaya diatas mendapatkan respon yang positif. Melalui Instruksi Gubernur (InGub) Nomor 66 Tahun 2019 tentang Pengendalian Kualitas Udara, Gubernur DKI Jakarta berinisiatif untuk membuat aksi komprehensif yang diupayakan dapat membantu dalam upaya pengendalian kualitas udara di Jakarta. Adapun aksi komprehensif tersebut, seperti akan ada perluasan kawasan ganjil genap, kewajiban uji emisi bagi kendaraan yang beroperasi di Jakarta, perluasan trotoar bagi pejalan kaki, monitoring emisi dari pembangkit listrik, hingga penerapan *congestion pricing* di wilayah-wilayah transportasi umum terintegrasi.¹⁰⁷

5.4 Melakukan Kolaborasi dan Terlibat dalam Penggarapan Film Investigatif

Pada tahun 2019, Greenpeace bekerja sama dengan rumah produksi audio visual *Watchdoc Documentary* menggarap *project* film dokumenter dengan judul, “Dilarang Sakit”.¹⁰⁸ Film yang dirilis pada tahun 2020 ini, secara garis besar menceritakan tentang carut marut dan kisruh yang terjadi pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), sehingga menimbulkan dampak kenaikan iuran terhadap masyarakat.

Dalam perjalanannya, film ini membantah klaim pemerintah yang menyebutkan bahwa defisit anggaran di BPJS terjadi akibat adanya penangguhan iuran masyarakat. Dalam alur yang disampaikan dalam film, penangguhan iuran bukanlah satu-satunya faktor penyebab *collapse*-nya BPJS melainkan akibat faktor lain, yakni membengkaknya alokasi anggaran karena penyakit-penyakit katastrofik yang berkaitan erat dengan kebersihan lingkungan dan kualitas udara yang sehat. Berdasarkan hasil penelusuran yang dilakukan, ditemukan bahwa pasien rawat jalan terbanyak di Rumah Sakit Daerah di Jakarta adalah penderita Infeksi Saluran Pernapasan Atas (ISPA) yang disebabkan oleh polusi udara. Oleh karena itu, fakta

¹⁰⁷ CNBC Indonesia. (2019). *Jurus Baru Anies Lawan Polusi Udara: Rilis Instruksi Gubernur*. – CNBC Indonesia. <https://www.cnbcindonesia.com/>. Diakses 19 Juli 2022.

¹⁰⁸ Watchdoc Documentary. (2020). *Dilarang Sakit*. – *Watchdoc Documentary* [Video]. <https://www.youtube.com/watch?v=ucysGwpGg40>. Diakses 6 Agustus 2022.

bahwa kondisi udara yang buruk di kota-kota besar seperti Jakarta, secara tidak langsung turut menyumbang biaya kesehatan dan ekonomi yang dapat membebani masyarakat maupun negara.

Gambar 5.4 Perbandingan Biaya Kerugian Akibat Polusi Udara di Jakarta dengan defisit BPJS Tahun 2019



Sumber: Greenpeace Indonesia

Guna menekan beban anggaran akibat dampak kualitas udara yang buruk, diperlukan kebijakan-kebijakan yang sangat berkaitan dengan pemerintah. Melalui keterangan dalam film, hingga saat ini, Indonesia masih menerapkan Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) yang lebih longgar ketimbang United States Air Quality Index (US AQI) yang banyak menjadi acuan di negara-negara lain. Hal ini tentu berakibat pada indeks kualitas udara yang rendah sehingga turut mempengaruhi langkah perbaikan kualitas udara yang dilakukan oleh pemerintah. Greenpeace dan *Watchdog Documentary* mencoba membantah klaim pemerintah yang mengatakan bahwa kesalahan tata kelola BPJS menjadi faktor terjadinya defisit. Selain itu, logika surplus-defisit dalam pelaksanaan jaminan kesehatan juga dinilai keliru sehingga berakibat pada kesalahan solusi yang ditawarkan.

Agar BPJS tidak defisit, pemerintah meminta masyarakat untuk menjaga pola hidup sehat. Targetnya agar warga tak sakit dan tak perlu ke rumah sakit. Namun, disisi lain, terdapat pelanggaran aturan pemerintah tentang pengendalian kadar polusi udara. Oleh sebab itu, melalui film ini, Greenpeace dan *Watchdoc Documentary* memberikan pesan bahwa penyakit bukan semata-mata tentang kemampuan masyarakat menjaga kesehatan, melainkan juga urusan ekonomi-politik, bahkan terkait dengan kebijakan transportasi dan lingkungan.

5.5 Pembentukan Koalisi dan Pengajuan Gugatan Warga Negara (*Citizen Law Suit*)

Sebagai bentuk upaya penyelesaian pencemaran udara, terjadi gugatan warga negara atau *Citizen Law Suit* (CLS) oleh Greenpeace Indonesia, Walhi, LBH Jakarta, YLBHI, dan 32 orang warga Jakarta, yang tergabung bersama dalam Koalisi Inisiatif Bersihkan Udara Koalisi Semesta (Koalisi IbuKota), kepada sejumlah institusi pemerintah untuk menuntut hak mereka dalam memperoleh udara bersih di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Gugatan yang dilayangkan oleh Greenpeace bersama jaringan Koalisi Inisiatif Bersihkan Udara Koalisi Semesta (Koalisi IbuKota), dilatarbelakangi oleh kekecewaan terhadap para pemangku kebijakan yang dinilai lalai terhadap tanggungjawab yang tercantum dalam Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi bahwa “*Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.*”¹⁰⁹

Dalam perjalanannya, gugatan yang dilayangkan pada 4 Juli 2019, sempat mengalami masa persidangan selama lebih dari dua tahun hingga mengalami delapan kali penundaan sidang putusan. Hingga pada 16 September 2021, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta Pusat memutuskan bahwa mengabulkan gugatan para tergugat sebagian dan menyatakan Tergugat I,II,III,IV,V, dan Turut Tergugat I & II

¹⁰⁹ Greenpeace Indonesia. (2019). Kualitas Udara Jakarta Terus Memburuk, Warga Akan Gugat Presiden, Menteri hingga Gubernur. – *Greenpeace Indonesia*. <https://www.greenpeace.org/>. Diakses 19 Juli 2022.

bertanggung jawab atas persoalan pencemaran udara di Jakarta.¹¹⁰ Adapun para tergugat dan turut tergugat diantaranya adalah: TERGUGAT 1 (Presiden Republik Indonesia), TERGUGAT 2 (Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan), TERGUGAT 3 (Menteri Dalam Negeri), TERGUGAT 4 (Menteri Kesehatan), TERGUGAT 5 (Gubernur DKI Jakarta), TURUT TERGUGAT 1 (Gubernur Banten), dan TURUT TERGUGAT 2 (Gubernur Jawa Barat).¹¹¹

Upaya gugatan yang dilakukan oleh Greenpeace bersama Koalisi Ibu Kota, mendapatkan tanggapan dan berhasil mempengaruhi para pemangku kebijakan. Gubernur DKI Jakarta yang turut tergugat dalam perkara ini, merespon dan menyatakan menerima dan siap menjalankan putusan pengadilan.¹¹² Namun disisi lain, para tergugat seperti Presiden, Menteri KLHK, Mendagri, dan Menkes, memutuskan mengajukan banding terhadap putusan PN Jakarta pusat atas gugatan permasalahan pencemaran udara di Jakarta.

¹¹⁰ Greenpeace Indonesia. (2021). Tujuh Pejabat Negara Diputus Melakukan Perbuatan Melawan Hukum Atas Pencemaran Udara Jakarta. – *Greenpeace Indonesia*. <https://www.greenpeace.org/>. Diakses 20 Juli 2022.

¹¹¹ Greenpeace Indonesia. (2020). Gugatan Pencemaran Udara “Satu Tahun Digantung Negara”. – *Greenpeace Indonesia*. <https://www.greenpeace.org/>. Diakses 20 Juli 2022.

¹¹² Tempo. (2021). Anies Baswedan: Pemprov DKI Tidak Banding Atas Gugatan Polusi Udara Jakarta. – *Tempo.co*. <https://metro.tempo.co/>. Diakses 24 Juli 2022.